

Dorong BUMN-Swasta Biyai Pembangunan

NUSA DUA – Badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta didorong untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proyek infrastruktur melalui skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif.

Langkah tersebut dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembangunan. Dengan demikian, APBN diharapkan tetap sehat dan terjaga akuntabilitasnya.

"Kalau dilihat dalam evolusi pembiayaan pembangunan, selama ini kita dengan mudah ber-

gantung pada APBN. Sementara begitu banyak dana dari luar APBN, baik BUMN atau swasta dalam dan luar negeri yang ingin berpartisipasi," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di sela-sela Diskusi Media bertajuk "Pembiayaan Kreatif dan Inovatif: Showcase Model Indonesia" dalam rangkaian kegiatan Pertemuan Tahunan IMF-WBG Bali 2018 di Nusa Dua, Bali, kemarin.

Menurut Sri Mulyani, proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai melalui pembiayaan yang tidak murni APBN akan terus didorong.

Ke Hal 15)

Dorong BUMN-Swasta Biyai Pembangunan

((dari Hal 1

Menurut dia, pemerintah dalam 10 tahun terakhir telah menginisiasi beberapa skema pembiayaan inovatif dan kreatif dengan bentuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan mengasikan BUMN di bawah Kementerian Keuangan, serta skema *blended finance*.

"Kita bentuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), lalu ada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk perumahan. Dari BUMN tersebut, kami mengukuhkan institusi ini sekaligus mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan," tuturnya. Sri Mulyani menambahkan, saat ini proyek pembangunan infrastruktur sedang gencar dan sangat menarik bagi swasta untuk ikut serta. Untuk itu, harus ada inisiatif dari menteri atau kementerian terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memberi ruang swasta berpartisipasi sehingga mampu mengakselerasi.

"Kalau banyak yang tertarik, kita strukturkan sehingga partisipasi swasta bisa memper-

cepat namun tetap akuntabel," ucap Sri Mulyani.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengakui, apabila hanya mengandalkan APBN, anggaran untuk belanja infrastruktur tidak akan cukup. Setiap tahunnya, kata dia, Kementerian PUPR mendapat APBN rata-rata Rp105 triliun, sedangkan untuk belanja jalan tol saja mencapai lebih dari Rp350 triliun.

"Bayangkan kebutuhan infrastruktur kita baik jalan, jembatan, irigasi, air, perumahan, dengan *demand* besar dan kalau hanya mengandalkan APBN saja, pasti kita tidak akan bisa mengejar ketertinggalan," ujarnya.

Dia melanjutkan, dengan pembiayaan alternatif tersebut diharapkan mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program yang telah dicanangkan bersama.

Basuki mencontohkan, untuk pemeliharaan jalan nasional bisa melibatkan swasta melalui skema KPBU-*Availability Payment* (Pembayaran Ketersediaan Layanan) atau dengan pembayaran yang dicicil.

"Selama ini kita enggan mengra bahwa ini bisa untuk peliharajalan nasional kita. Dengan skema ini, jalan bisa kita pelihara sepanjang tahun tanpa bergan-



(Kiri ke kanan) Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menko Maritim Luhut B Pandjaitan, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat press briefing IMF-World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, kemarin.

tung pada siklus APBN. Ini baru akan dimulai pada 2019 untuk ruas jalan Jalur Lintas Timur, serta beberapa ruas di Kalimantan dan Papua," ungkapnya.

Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini mengatakan, skema KPBU telah dijalankan oleh perseoran untuk mendukung sejumlah proyek infrastruktur seperti jalan tol dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). "Setidaknya ada 10-15

SPAM yang kami siapkan dengan KPBU. Ke depan konsep *blended finance* akan kita *embrace* di proyek-proyek yang kita ingin kembangkan," ucapnya.

Sementara itu, Bank Mandiri mengkoordinasikan investasi langsung senilai Rp200 triliun pada 21 proyek BUMN. Kesepakatan kerja sama investasi tersebut dilakukan dalam rangkaian acara Indonesia Investment Forum (IIF) 2018

yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN melalui Bank Mandiri.

Forum investasi yang berlangsung di Hotel Conrad Nusa Dua Bali, Selasa (9/10) ini, diselenggarakan untuk mengoptimalkan pertemuan tahunan IMF dan World Bank di Bali. Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas menga-

takan, forum ini sangat penting untuk menciptakan sinergi antara investor, pemangku kepentingan dan berbagai peluang investasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pembiayaan Ekspor

Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan dan peluncuran beberapa proyek pembiayaan, di antaranya dua proyek di bawah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yaitu Fasilitas Pembiayaan UKM Ekspor kepada PT Gema Ista Raya dan *agreement signing* antara Eximbank dan PT Wijaya Karya (persero) Tbk terkait pembiayaan dukungan pembiayaan proyek konstruksi di Afrika. Selain itu, satu proyek di bawah PT Indonesia Infrastructure Finance yakni Konsorsium PT Nusantara Infrastructure Tbk-PT Aset Indonesia Tbk-PT Adhikarya (persero) Tbk untuk tol JORR III Cikunir-Ujungjati.

KPBU sebagai salah satu alternatif pembiayaan adalah skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang berdasarkan pada kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (swasta). Pada 2019, direncanakan bebe-

rapa proyek infrastruktur yang dibangun melalui skema KPBU-*Availability Payment* dengan nilai diperkirakan Rp9,38 triliun.

Empat Agenda Penting

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF)-Bank Dunia (World Bank) tahun ini, pemerintah Indonesia selaku tuan rumah menyiapkan empat agenda penting.

Keempat isu utama dalam pertemuan tahunan yang 198 negara meliputi *human capital development index* (HCDD), ekonomi digital, keuangan syariah, dan bantuan kebencanaan. Khusus yang terakhir, sengaja di-agendakan mengingat Indonesia baru saja mendapatkan musibah gempa bumi dan tsunami di Lombok dan Palu.

Sri Mulyani mengatakan, isu-isu yang akan disampaikan pada forum internasional tersebut dinilai relevan dengan kondisi dan kepentingan nasional saat ini. Khusus untuk investasi pada *human capital* dan ekonomi digital mendapat perhatian cukup besar sehingga pembahasannya diupayakan menjadi sebuah inisiatif global.

• **inda/s/**
miftahul chuana/ant